



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**

**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI)  
TAHUN 2023**

**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas izin dan rahmatNYA sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2022 dapat disusun dengan baik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan demikian LKPJ Tahun 2023 ini merupakan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2023 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dan mendukung dalam proses penyusunan LKPJ Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi, semoga dapat bermanfaat dalam memberikan informasi terhadap Penyusunan LPPD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Kotabaru, Januari 2024

**Kepala Dinas,**

**Ir. H. Hardhani, M.Si**

Nip.19650401 199308 1001

Pembina Utama Muda IV/c

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **BABI    PENDAHULUAN**

#### **1.1.    Dasar Hukum**

1.1.1.    Dasar Hukum Penyusunan LKPJ

1.1.2.    Dasar Hukum Pembentukan SKPJ

#### **1.2.    Gambaran Umum**

1.2.1.    Struktur Organisasi

1.2.2.    Tugas Pokok dan fungsi

1.2.3.    Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat structural dan Fungsional

1.2.4.    Kondisi Sarana dan Prasarana

### **BABII    CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

2.1.    Capaian Pelaksanaan program dan kegiatan

2.2.    Kebijakan Strategis yang dilaksanakan

2.3.    Capaian Indikator Kinerja kunci keluaran (Output)

2.4.    Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

2.5.    Capaian Kinerja Kunci untuk fungsi penunjang Urusan pemerintahan

2.6.    Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.7.    Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun anggaran Sebelumnya (Lihat Keterangan pada Catatan)

### **BAB III    CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

3.1.    Tugas Pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1.    Target Kinerja

3.1.2.    Realisasi

3.2.    Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1.    Target Kinerja

3.2.2.    Realisasi

3.3. Permasalahan dan kendala

3.4. Saran dan TindakLanjut

#### BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Yang dilaksanakan

4.1.1. Jenispelayanan Dasar

4.1.2. Target pencapaian SPM

4.1.3. Realisasi

4.1.4. AlokasiAnggaran

4.1.5. DukumenPersonil

4.1.6. Permasalah dan Solusi

#### BAB V PENUTUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 DASAR HUKUM**

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan pembangunan agar mampu eksis, unggul, dan mampu memberikan kontribusi serta peran nyata dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah daerah maka instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

##### **1.1.1. Dasar Hukum Penyusunan LKPJ**

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standard Akutansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah.
9. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
10. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang penetapan kinerja.
11. KepMenPAN No.135 Tahun 2004 tentang pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja.

12. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan, organisasi dan tata kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 tentang organisasi dan tata kerja kementrian Negara perdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi.
15. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 13 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2010.
16. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Lakip.
17. Pepres No 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022( Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 176);

### **1.1.2. Dasar Hukum Pembentukan SKPD**

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang mampu memberikan kontribusi serta perannya dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kotabaru berpedoman pada peraturan yang ada antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah kabupaten kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 20);
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, organisasi tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru.

## **1.2 GAMBARAN UMUM**

### **1.2.1. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4); dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru.

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru terdiri Kepala Dinas, Sekretaris, 5 (lima) Bidang, 13 (tigabelas) seksi, 3 (tiga) Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dapat diuraikanse sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiridari:
  - 1) Subbagian Perencanaan ;
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
  - 3) Subagian Keuangan ;
- c. Bidang Koperasi terdiri dari :
  - 1) Seksi Kelembagaan dan pengawasan Koperasi;
  - 2) Seksi Bina Usaha Koperasi ;
  - 3) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- d. Bidang Usaha mikro terdiri dari :
  - 1) Seksi pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro ;
  - 2) Seksi Pengembangan Kewirausahaan ;
- e. Bidang Perindustrian terdiridari :
  - 1) Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri;
  - 2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Industri ;
  - 3) Seksi Sistem Inpormasi dan fasilitas Industri ;
- f. Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan
  - 1) Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - 2) Seksi Pengawasan dan perlindungan Konsumen;
- g. Bidang Stabilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan
  - 1) Seksi Pengelolasarana dan Prasarana Distribusi;
  - 2) Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan;
  - 3) Seksi Stabilitasi barang pokok dan Penting;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



### **1.2.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru yang beralamat di Jalan Putri Ciptasari Komplek Pasar Kemakmuran Kotabaru Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Pembentukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2019 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4); dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut ;

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asasotonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
  - c. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang koperasi;

- d. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang usaha mikro;
- e. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang perindustrian;
- f. Penyelenggaraan, Pengkoordinasian dan evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang Kemetrolagian dan pengawasan perdagangan;
- g. Penyelenggaraan, Pengkoordinasian dan evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang stabilitasi dan sarana distribusi perdagangan;
- h. penyelenggara pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. penyelenggaran pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di UPTD; dan
- k. penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1. Kesekretariat.**

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian.

### **2. Bidang Koperasi**

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas di bidang koperasi yang meliputi kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi.

**a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi**

Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang koperasi dalam kelembagaan dan pengawasan Koperasi

**b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi**

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang koperasi dalam peningkatan kualitas SDM Koperasi.

**c. Seksi Bina Usaha Koperasi**

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas Bidang Koperasi dalam Pembinaan dan Pengelolaan Bina Usaha Koperasi.

**3. Bidang Usaha Mikro**

Bidang usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas-tugas di bidang usaha mikro yang meliputi pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro dan pengembangan kewirausahaan.

**a. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro**

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro dalam pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro.

**b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan**

Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang usaha mikro dalam pengelolaan pengembangan kewirausahaan.

**4. Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas di bidang perindustrian yang meliputi pembangunan

dan pengembangan pembangunan industri, perijinan dan inovasi industri, dan sistem informasi industri.

**a. Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri**

Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dalam Pemberdayaan dan inovasi industri.

**b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Industri**

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dalam pembangunan dan pengembangan industri.

**c. Seksi Sistem Informasi dan Fasilitas Industri**

Seksi Sistem Informasi dan Fasilitas Industri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dalam system informasi dan Fasilitas industri.

**5. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan**

Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyedia dan memeriksa tugas-tugas di bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan yang meliputi pelayanan tera dan tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan.

**a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang**

Seksi PelayananTera dan Tera Ulang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan dalam pelaksanaantera, dan tera ulangalatukur.

**b. Seksi Pengawasan dan PerlindunganKonsumen**

Seksi Pengawasan dan PerlindunganKonsumen mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan konsumen.

## **6. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan**

Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas di bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan yang meliputi pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting.

### **a. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Distribusi**

Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan dalam pelaksanaan pembangunan sarana distribusi perdagangan.

### **b. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan**

Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan dalam pembinaan usaha perdagangan.

### **c. Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting**

Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan dalam pelaksanaan stabilisasi barang pokok dan penting.

## **Kelompok Jabatan Fungsional**

### 1.2.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, organisasi tugas pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru memiliki sumberdaya manusia (SDM) pada Tahun 2023 sebanyak 55 orang, dan didukung tenaga non PNS sebanyak 75 orang, sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 55 orang;
2. Tenaga Non PNS (TNP) sebanyak 75 orang terdiri dari ;
  - a. 45 Orang Tenaga Kebersihan
  - b. 30 Orang Tenaga Administrasi lainnya

Rincian pegawai PNS dan TNP dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### a. Jumlah Pegawai Struktural

NO	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH (ORANG)	KET
1	<b>Kepala Dinas</b>	1	
2	<b>Sekretaris</b>	1	
	a. Subbagian Perencanaan	1	
	b. Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	
	c. Sub Bagian Keuangan	0	
3	<b>Bidang Koperasi</b>	1	
	a. Seksi Kelembagaan dan pengawasan Koperasi;	-	
	b. Seksi Bina Usaha Koperasi ;	1	
	c. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	1	
4	<b>Bidang Usahamikro</b>	0	
	a. Seksi pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	0	
	b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan	0	
5	<b>Bidang Perindustrian</b>	1	
	a. Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri;	0	
	b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Industri	0	
	c. Seksi Sistem Informasi dan fasilitasi Industri	0	
6	<b>Bidang Kemetrlogian dan Pengawasan Perdagangan</b>	1	
	a. Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0	
	b.. Seksi Pengawasan dan perlindungan Konsumen	0	
7	<b>Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	1	
	a. Seksi Pengelolaan sarana dan Prasarana Distribusi	0	
	b. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan	0	
	c. Seksi Stabilitas barang pokok dan Penting	1	
8	<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>		

**b. Kualifikasi pendidikan**

**Tabel 1**

Jumlah PNS dan Non PNS Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan menurut Golongan dan pendidikan Tahun 2023

No	Jumlah pegawai menurut						Keterangan		
	Golongan	Jumlah	%	Pendidikan	Jumlah	%	Jabatan	Jumlah	%
1	I	4 org		SD/SMP	6 org		Struktural	13 Org	
2	II	18 org		SMA	25 org		Fungsional khusus	4 org	
3	III	27 org		DIII	3 org		Fungsional	38 org	
4	IV	6 ORG		S1	15 org				
				S2	7 org				
				S3	0 org				
	Tenaga Non PNS								
1	TNP	65 org		SD/SMP	30 ORG		Petugas kebersihan pasar	45 org	
				SMA	26 org		Administrasi	20 org	
				S.1	9 org				

**Tabel 2**

SDM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Pada Tahun 2023 Menurut eselon/ Golongan.

NO	Jumlah pejabat menurut					
	Eselon	Jumlah	%	Golongan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
	II	1 org		Ia	0 org	
	III	5 org		I b	0 org	
	IV	6 org		I c	2 org	
	Non eselon	43 org		I d	2 org	
				II a	1 org	
				II b	1 org	
				II c	9 org	
				II d	7 Org	
				III a	13 org	
				III b	6 Org	
				III c	3 org	
				III d	6 org	
				IV a	5 Org	
				IV b	0 org	
				IV c	1 org	
				IV d	0 Org	

**Tabel 3**

Keadaan SDM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Kotabaru Pada Tahun 2023 Menurut  
Penempatan/Penugasan.

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan	
			Diisi	Kosong
1	Kepala Dinas/Badan	1 Org	1	0
2	Sekretaris	1 org	1	0
3	KepalaBidang	5 org	4	1
4	Kasub Bag	3 org	2	1
5	Kapalaseksi	13 org	4	9

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru dapat dilihat dalam daftar lampiran

#### **1.2.4. KONDISISARANA DAN PRASARANA**

Sarana prasarana sangat berpengaruh langsung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja walaupun ada beberapa sarana prasarana yang masih kurang serta mengalami kerusakan. Selain itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui wifi dan sudah memiliki alamat website serta email resmi. Berikut ini perkembangan Data Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru dapat dilihat dalam daftar sebagai berikut.

Table. 1.2.4



## Daftar inventaris Sarana dan prasarana

NO	Jenissarana dan prasarana	Keterangan
1	Mobil	baik
2	Sepeda motor	baik
3	Filling besi/metal	baik
4	Band kas	baik
5	Lemarikayu	baik
6	Papannamainstansi	baik
7	Papanpengumuman	baik
8	Papantulis	baik
9	Whiteboard	baik
10	Overhead proyektor	baik
11	Mejakayu	baik
12	Kursibesi/metal	baik
13	Kursikayu	baik
14	Mejarapat	baik
15	Mejatulis	baik
16	Kursirapat	baik
17	Kursiputar	baik
18	Kursibiasa	baik
19	Kursilipat	baik
20	Sofa	baik
21	Mebeulerlainnya	baik
22	Lemariarsip	baik
23	Alat pembersih lain-lain	baik
24	Lemari Es	baik
25	AC Unit	baik
26	KipasAngin	baik
27	Televisi	baik
28	Sound Sistem	baik
29	TiangBendera	baik
30	TanggaAlumunium	baik
31	Dispenser	baik
32	Alat RumahTangga Lain-lain	baik
33	Gordin/Vitras	baik
34	Notebook	baik
35	Personal Komputer Lain-lain	baik
36	Printer	baik
37	Scenner	rusak
38	MejaKerjaPejabatEselon II	baik
39	KursiPejabatEselon II	baik
40	KursiKerjaPegawai Non Struktural	baik
41	KursiKerjaPejabat Lain-lain	baik
42	LemariArsipUntukArsip Dinas	baik
43	Lemari&ArsipPejabat lain-lain	baik
44	Micropon/Wirelles Mic	baik
45	CCVT	rusak
46	Camera Electron	baik
47	Sound Sistem	baik
48	Facsilime	rusak
49	Bangunan Gedung Kantor Permanen	baik
50	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	baik
51	Gedung Pertokoan/ Pasar Permanen	baik
52	Gedung Pertokoan/Pasar Semi Permanen	baik
53	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	baik
54	Bangunan Gedung FasilitasUmumLainnya	baik
55	Instalasi Air Bersih Lain-lain	baik
56	JaringanTelepon/internet	baik

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk Tahun Anggaran 2023 mempunyai 13 (tigabelas) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan untuk program dan kegiatan tersebut terbagi menjadi dua rusan, yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Untuk urusan wajib ada 1 (satu) program rutin, 3 (tiga) program dibidang koperasi, 2 (dua) program bidang Usaha mikro. Untuk urusan pilihan ada 4 (empat) program dibidang Stabilisasi sarana dan prasarana distribusi perdagangan, 1 (satu) program di bidang Metrologi dan pengawasan Perdagangan, dan 3 (tiga) program dibidang Industri. Anggaran yang tersedia untuk belanja Program dan kegiatan sebesar Rp. 24.038.462.320,- terealisasi sebesar Rp. 19.006.536.725.- atau pencapaian 79.07 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

##### 1. Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub keg. penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 253.100.922,- terealisasi sebesar Rp. 252.433.769.- atau 99,74% digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan belanja rupa. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dokumen perencanaan sebanyak 3 dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	253.100.922	252.433.769
2	Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	3 duk	3 dok
3	Hasil	Tersedianya dok perencanaan	100	99,74

2. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 7.267.600,- atau 90,85% digunakan untuk melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD tersusun sebanyak 1 dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.2  
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	8,000,000,-	7.267.600
2	Keluaran	Jumlah dokumen RKA-SKPD tersusun	1 duk	1 dok
3	Hasil	Tersedianya dok RKA	100	90,85

3. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 5.998,300,- atau 99,97% digunakan untuk melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun sebanyak 1 dokumen selama 3 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.3  
Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD  
Tahun 2023

	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	8,000,000,-	5.998,300
2	Keluaran	Jumlah dokumen RKA-SKPD tersusun	1 duk	1 dok
3	Hasil	Tersedianya Dokumen perubahan RKA	100%	99,97

4. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 5.998.385,- atau 99,97% digunakan untuk melaksanakan koordinasi penyusunan DPA-SKPD. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD

tersusun sebanyak 1 dokumen selama 3 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.4  
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2023

	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	6,000,000,-	5,998,385.-
2	Keluaran	Jumlahdokumen DPA-SKPD tersusun	1 duk	1 dok
3	Hasil	Dukumen RKA	100%	99,97

#### 5. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,-terrealisasi sebesar Rp. 4.546.400,- atau 90,93% digunakan untuk melaksanakan koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD tersusun sebanyak 1 dokselama 3 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.5  
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2023

	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	5,000,000,-	4,546.400.
2	Keluaran	Jumlahdokumen perubahan DPA-SKPD tersusun	1 duk	1 duk
3	Hasil	Dukumen RKA	100%	90,93

#### 6. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.010.000,-terrealisasi sebesar Rp. 11.991.742,- atau 99,85% digunakanuntuk melaksanakan koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.6

Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar  
realisasi kinerja SKPD Tahun 2023

	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	12,010,000,-	11,991.742,-
2	Keluaran	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	1 duk	1 duk
3	Hasil	Dokumen RKA	100%	99,85

7. Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 139.689.900,- terealisasi sebesar Rp. 139.055.200,- atau 99,85% digunakan untuk rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Hasil yang dicapai /outcome kegiatan yaitu jumlah evaluasi kinerja sebanyak 3 dokumen selama 12 bulan dengan baik di lingkungan kantor Dinas. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.6  
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	139.689.900,-	139.055.200
2	Keluaran	Jumlah dok evaluasi kinerja PD	3 duk	3 dok
3	Hasil	Tersedianya Dok Evaluasi kinerja	100 %	99.85

## 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.697.351.557,- terealisasi sebesar Rp. 6.693.825.930,- atau 85,02% digunakan untuk melakukan pembayaran gaji, tunjangan dan insentif. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pembayaran gaji dan tunjangan banyak 14 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	6.697.351.557,-	6.693.825.930.-
2	Keluaran	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	14 kl	14 kl
3	Hasil	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100%	85,02

**2. Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48.453.874,- terealisasi sebesar Rp. 48.421.525,- atau 99,93% digunakan untuk melakukan penyediaan membayar honorarium kegiatan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terbayar sebanyak 12 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel**  
**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tahun 2023**

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	48.453.874,-	48.421.525
2	Keluaran	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terbayar	12 kl	12 kl
3	Hasil	terbayar honorarium kegiatan	100	99,93

**3. Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 580.310.000,- terealisasi sebesar Rp. 548.450.000,- atau 94,51% digunakan untuk melakukan membayar honorarium verifikasi keuangan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dokumen penatausahaan keuangan SKPD yang verifikasi sebanyak 12 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel**  
**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN Tahun 2023**

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	580.310.000,-	548.450.000
2	Keluaran	jumlah dokumen penatausahaan keuangan SKPD yang verifikasi	12 kl	12 kl
3	Hasil	Terbayar honorarium pengelola kegiatan dan verifikasi keuangan	100	94,51

4. Sub keg. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.499.948,- terealisasi sebesar Rp. 3.495.300,- atau 99,87% digunakan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD  
Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	3.499.948,-	3.495.300
2	Keluaran	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dok	1 dok
3	Hasil	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun	100%	99,87

5. Sub Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 999.974,- terealisasi sebesar Rp. 998.300,- atau 99,83% digunakan untuk penyusunan dokumen analisis dan realisasi keuangan semesteran. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran tersusun sebanyak 1 dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis  
realisasi anggaran Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	999.974	998.300
2	Keluaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran tersusun	1 dok	1 dok
dok	Hasil	Tersedianya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran tersusun	100	99.83

### 3. Keg. Administrasi kepegawaian Peraangkat daerah

1. Sub keg. Bimbingan Tehnis Implementai Peraturan Perundang-undangan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 49.380.000,- terealisasi sebesar Rp. 48.229.090,- atau 97,67% digunakan untuk pendidikan dan pelatihan bagi asn dalam rangka meningkatkan kinerja . Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah Bimbingan Tehnis Implementai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebanyak 9 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Bimbingan tehnis implementai peraturan perundang-undangan  
tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	49.3580.000	48.229.090
2	Keluaran	Jumlahbimbingan tehnis peraturan perundang-undangan yang berlaku	9org	9 org
3	Hasil	Terukur,terampil dan terdidik terhadap kinerja	100%	97,67

### 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29.941.160,-teralisasi sebesar Rp. 29.941.160,- atau100% digunakan untuk penyediaan komponen instalasi listrik dan penggantian lampu, penerangan blok-blok pasar serta lingkungan pasar. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 12 paket selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
PenyediaanBarangCetakan Dan Penggandaan Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	29.941.160	29.941.160
2	Keluaran	Jumla hpenyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 kl	12 kl
3	Hasil	Kantor, blok toko/kios pasar, selasar dan halaman terang -Pengawasan petugas tetap terjaga dengan baik	100 %	100



2. Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 24.940.869,- terealisasi sebesar Rp. 24.934.236,- atau 99,97% digunakan untuk penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Hasil yang dicapai/outcome kegiatannya itu jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 12 paket selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	24.940.869,-	24.934.236
2	Keluaran	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket
3	Hasil	lingkungan pasar bersih dan sehat	100%	99,97

4. Sub Keg. Penyediaan bahan logistik Kantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 478.776.618,- terealisasi sebesar Rp. 478.383.477,- atau 99,92% digunakan untuk operasional kantor dan kegiatan lapangan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatannya itu jumlah penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 12 paket selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Penyediaan bahan logistic Kantor tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	478.776.618-	478.383.477
2	Keluaran	Jumlah penyediaan bahan kebutuhan kantor, rapat dan lapangan	12 paket	12 paket
3	Hasil	Kelancaran dan kebutuhan administrasi kegiatan	100%	99.92

5. Sub keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 35.001.500,- terealisasi sebesar Rp. 34.850.300,- atau 99,57% digunakan untuk bahan cetak pengelolaan administrasi penerimaan retribusi daerah hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 12 paket

selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	35.001.500	34.850.300
2	Keluaran	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia .	12 paket	12 paket
3	Hasil	Tingkat penerimaan PAD dan administrasi kegiatan .	100%	99,57

6. Sub keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 425.108.000,- terealisasi sebesar Rp. 425.063.758.- atau 99,99% digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka untuk mendukung pembangunan daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan sebanyak 75 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	425.108.000,-	425.063.758.-
2	Keluaran	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	75 kl	75 kl
3	Hasil	Penyampaian informasi program dan kegiatan pembangunan daerah	100%	99.99

## **5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

1. Sub keg. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 107.154.120,- terealisasi sebesar Rp. 94.275.000,- atau 87,98% digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan sebanyak 7 unit selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	107.154.120,-	94.275.000
2	Keluaran	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	7 unit	7 unt
3	Hasil	Peningkatan kinerja dalam melaksanakan kegiatan	100%	87,98

## 6. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### 1. Sub keg. Penyediaan jasa surat menyurat.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 83,33% digunakan untuk melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kuitansi bermaterai dan pemindah bukuan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 1500 lembar selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Penyediaan jasa surat menyurat tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	realisasi
1	Masukan	Dana	6.000.000	5.000.000
2	Keluaran	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	12 lap
3	Hasil	Tertib administrasi jasa surat menyurat	100%	83,33

### 2. Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 356.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 325.528.969,- atau 91,26% digunakan untuk pembayaran rekening telpon, air dan listrik. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 4 langganan selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operational tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	356.700.000	325.528.969
2	Keluaran	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik yang tersedia	4 lap	4 lap
3	Hasil	Terpenuhinya lingkungan pasar terang, nyaman	100%	91,26

3. Sub keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.563.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.561.500.000,- atau 99.87% digunakan untuk kegiatan jasa pelayanan umum kantor. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 60 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	1.563.500.000	1.561.500.000
2	Keluaran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 lap	60 lap
3	Hasil	Tertib dan teratur terhadap pelayanan umum	100%	99,87

## 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Sub keg. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 154.075.567,- terealisasi sebesar Rp. 151.835.302,- atau 98,55% digunakan untuk pembayaran pajak kendaraan operasional, jasa service, suku cadang dan operasional angkutan sampah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan sebanyak 4 unit selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	154.075.567	151.835.302
2	Keluaran	Jumlah kendaraan operasional, pajak dan perijinan	4 unit	4 unit
3	Hasil	Terbayar pemeliharaan kendaraan operasional dan penggantian suku cadang	100%	98,55

2. Sub keg. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 77.280.000,-, terealisasi sebesar Rp. 75.715.000,- atau 97,97% digunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan sebanyak 40 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	77.280.000,-	75.715.000
2	Keluaran	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	40 unit	40 unit
3	Hasil	Untuk kelancaran administrasi pelayanan dan kelancaran kinerja	100%	97,97

3. Sub keg. pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 115.700.000,-, terealisasi sebesar Rp. 115.461.000,- atau 99,79% digunakan untuk pemeliharaan/rehab gedung kantor. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor lainnya yang disediakan sebanyak 1 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	115.700.000,-	115.461.000
2	Keluaran	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor	1 kl	1 kl
3	Hasil	Untuk kelancaran tugas dan kinerja pelayanan	100%	99,97

## 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

### 1. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

1. Sub keg. pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 130.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 129.769.426,- atau 99,82% digunakan untuk melakukan pengawasan kekuatan, kesehatan kemandirian dan ketangguhan koperasi. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan kemandirian dan ketangguhan serta akuntabilitas koperasi sebanyak 62 unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota tahun 2023

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	130.000.000	129.769.426,-
2	Keluaran	Jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan kemandirian dan ketangguhan serta akuntabilitas koperasi	52 unit usaha	52 unit usaha
3	Hasil	Peningkatan pengawasan pengelolaan dan pengurus koperasi	100%	99,82

2. Sub keg. pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/Kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 160.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 159.628.683,- atau 99,77% digunakan untuk peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 4 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	160.000.000	159.628.683,-
2	Keluaran	Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	17 unit usaha	17 unt

3	Hasil	Peningkatan pengetahuan dan wawasan pengurus koperasi tentang peraturan perundang-undangan	100%	99,77
---	-------	--	------	-------

### 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

#### 1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

1. Sub keg. peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 257.108.068,- terealisasi sebesar Rp. 256.261.600,- atau 99,67% digunakan untuk memberikan pendidikan dan peningkatan pengetahuan SDM pengurus dan pengelola koperasi hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi sebanyak 60 orang kali selama 2 kali. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	257.108.068,-	256.261.600
2	Keluaran	Jumlah peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	60 unit usaha	60 unit usaha
3	Hasil	Peningkatan pengetahuan dan sdm bagi pengelola dan pengurus koperasi	100%	99,67

### 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

#### 1. Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

1. Sub keg. pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 89.984.700,- atau 99,98% digunakan untuk peningkatan produktivitas, akses pasar pembiayaan pengutamaan kelembagaan usaha koperasi. Hasil yang

dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah akses pasar pembiayaan, penguatan kelembagaan penataan manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi. Sebanyak 12 unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel

Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan, manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	90.000.000	89.984.700
2	Keluaran	Jumlah pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah akses pasar pembiayaan, penguatan kelembagaan penataan manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi.	15 unit usaha	15 unit usaha
3	Hasil	Peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan usaha koperasi	100%	99,98

## 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

### 1. Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

1. Sub keg. pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.833.999.858,- terealisasi sebesar Rp. 1.346.273.877,- atau 35,11% digunakan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha mikro. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro sebanyak 160 kelompok/umk selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel

## Pendataan potensi dan pengembangan usahamikro tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	3.833.999.858,-	1.346.273.877
2	Keluaran	Jumlah pendataan potensi dan pengembangan usahamikro	160 klp	78 klp
3	Hasil	Tersedianya kebutuhan data usaha/klp usahamikro	100%	35.11

2. Sub keg. fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 159.999.723,- terealisasi sebesar Rp. 136.822.589,- atau 85,51% digunakan untuk memberikan fasilitasi dalam perizinan usaha mikro. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro sebanyak 60 Unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

## Fasilitasi kemudahan perizinan usahamikro Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	159.999.723	136.822.589
2	Keluaran	Jumlah fasilitasi kemudahan perizinan usahamikro	60 unit usaha	60 unit usaha
3	Hasil	Tersedianya legalitas data perizinan untuk usaha mikro	100%	85,511

3. Sub keg. pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 212.261.932,- terealisasi sebesar Rp. 209.245.000,- atau 98,58% digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha sebanyak 10 unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

## Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usahamikro tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	212.261.932	209.245.000,-
2	Keluaran	Jumlah pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usahamikro	10 unit usaha	10 umk
3	Hasil	Pengembangan potensi usahamikro	100%	98,58

## 6. Program Pengembangan UMKM

### 1. Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi Peningkatan skala usaha menjadi usaha mikro.

1. Kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, serta desain dan teknologi.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 410.059.838,-terrealisasi sebesar Rp. 399.319.740,- atau 97,38% digunakan untuk memfasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil, pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran desain dan teknologi. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SSM serta desain dan teknologi sebanyak 128 unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, sertadesain dan teknologi Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	410.059.838	399.319.740
2	Keluaran	Jumlahfasilitasiusahamikromenjadiusahakecildalam pengembanganproduksi dan pengolahanpemasaran SDM sertadesain dan tehnologi	128 unit usaha	128 umk
3	Hasil	Para penguruskoperasimempunyaikemampuanpengetahuantentangperkoperasian	100%	97,38

## 7. Program Perizinan dan PendaftaranPerusahaan

### 1. KegiatanPenerbitantanda daftar gudang

1. Sub keg. fasiltasi penerbitan tanda daftar gudang.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,-terrealisasi sebesar Rp. 80.541.130,- atau 80,54% digunakan untuk fasilitasi layanan penerbitan tanda daftar gudang. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah fasiltasi penerbitan tanda daftar gudang sebanyak 10 dokumen selama 12 bulan. Untuk

lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Fasilitas penerbitan tanda daftar gudang Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	100.000.000,	80.541.130
2	Keluaran	Jumlah rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang	10 dok	10 duk
3	Hasil	Fasilitas rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang	100%	80,54

## 2. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal)

### 1. Sub keg. koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.530.700,- atau 40,53% digunakan untuk koordinasi dan layanan penerbitan SKA. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA sebanyak 80 dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	100.000.000	40.530.700
2	Keluaran	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	80 dok	42 dok
3	Hasil	Terbitnya data layanan penerbitan SKA	100%	40,53

## 8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

### 1. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.

#### 1. Sub keg. penyediaan sarana distribusi perdagangan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.103.781.561,- terealisasi sebesar Rp. 2.766.598.823,- atau 89,14% digunakan untuk sarana distribusi perdagangan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan sebanyak 8 paket selama 12 bulan.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	3.103.781.561-	2.766.598.823
2	Keluaran	Jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan	8 paket	8 unit
3	Hasil	Peningkatan ekonomi masyarakat	100%	89,14

2. Sub keg. fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 209.998.368,- terealisasi sebesar Rp. 187.653.058,- atau 89,36% digunakan untuk peningkatan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan sebanyak 7 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Fasilitasi pengelolaan Sarana distribusi perdagangan tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	209.998.368	187.653.058
2	Keluaran	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	7 kl	7 unit
3	Hasil	Peningkatan perekonomian masyarakat	100%	89,36

**2. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di wilayah Kerjanya.**

1. Sub keg. pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 122.998.958,- terealisasi sebesar Rp. 114.898.958,- atau 93,41% digunakan untuk pembinaan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pembinaan, penertiban dan penataan sarana perdagangan sebanyak 55 dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Sarana distribusi  
perdagangan tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	122.998.958	114.898.958
2	Keluaran	Jumlah pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan	55 dok	55 dok
3	Hasil	Tertib pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	93,41

## 9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

### 1. Kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.

1. Sub keg. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 237.380.967,- terealisasi sebesar Rp. 163.096.967,- atau 68,71% digunakan untuk peningkatan informasi daftar harga kebutuhan pokok barang penting. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat sebanyak 96 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	237.380.967	163.096.967
2	Keluaran	Jumlah Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	96 lap	96 lap
3	Hasil	Tersedianya data daftar harga kebutuhan barang pokok masyarakat	100%	68.71

## 10. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

### 1. Kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

1. Sub keg. pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, teraulang.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 140.999.860,-terrealisasi sebesar Rp. 121.032.690,- atau 80,69% digunakan untuk peningkatan pelaksanaan tera, teraulang semua peralatan ukur, takartimbang dan perlengkapannya. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pelaksanaan metrology legal berpatera, tera ulang sebanyak 650 buah selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel  
Pelaksanaan metrologi legal, berupatera, teraulang Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	140.999.860	121.032.690
2	Keluaran	JumlahPelaksanaan metrology legal tera,teraulang	650 unit	650 unit
3	Hasil	Terjaminnyakwalitasalatukur,takartimbang dan perlengkapannyabertandasah	100%	80,69

2. Sub keg. pengawasan/penyuluhan metrologi legal.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 84.999.896,-terrealisasi sebesar Rp. 68.755.000,- atau 80,89% digunakan untuk peningkatan pengawasan dan penyuluhan alat ukur takar timbang metrologi legal. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pengawasan/penyuluhan metrologi legal sebanyak 30kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Pengawasan/penyuluhan metrologi legal tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	84.999.896	68.755.000-
2	Keluaran	jumlahpengawasan/penyuluhan metrology legal	30 kl	30 org
3	Hasil	Tertibperalatanukur,takar,timbang dan perlengkapnnya	100%	80,89

3. Sub keg. penyidikan metrologi legal.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.000.000,-terrealisasi sebesar Rp.75.885.337,- atau 84,32% digunakan untuk peningkatan peralatan ukur, takar timbang dan perlengkapnnya. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyidikan metrologi legal sebanyak 1000 buah selama12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel  
Penyidikan metrologi legal Tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	90.000.000	75.885.337
2	Keluaran	jumlahpenyidikan metrology legal	300 bh	300 bh
3	Hasil	Tertibalatukur dan konsumencerdas	100%	84,32

## 11. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri.

### 1. Kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan pembangunan.

1. Sub keg. peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 49.999.082,- terealisasi sebesar Rp. 32.527.082,- atau 65,06% digunakan untuk peningkatan promosi, pemasaran dan pembangunan industri. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan sebanyak 10 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	49.999.082	32.527.082,-,-
2	Keluaran	Jumlahpeningkatan system dan jaringaninformasiperdagangan	10 kl	10 kl
3	Hasil	Tersedianya data dan informasipembangunanindustri	100%	65,06%

## 12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

### 1. Kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

1. Sub keg. koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 239.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 202.132.639,- atau 84,57% digunakan untuk peningkatan koordinasi, sinkronisasi pembangunan sumber daya industri. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah

koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sumber daya industri sebanyak 1 dok selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel

Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	239.000.000	202.132.639
2	Keluaran	jumlahkoordinasi,sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sumberdayaindustri	1 dok	1 dok
3	Hasil	Trampil dalam pengelolaan dan sains teknologi	100%	84,57

## 2. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.344.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.637.628.431,- atau 69,86% digunakan untuk peningkatan koordinasi, sinkronisasi pembangunan sarana prasarana industri. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri sebanyak 1 dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	2.344.000.000.	1.637.628.431
2	Keluaran	Jumlah koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1 dok	1 dok
3	Hasil	Tersedianya sarana pembangunan industri	100%	69,86

## 3. Sub. Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 620.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 580.842.057,- atau 93,68% digunakan untuk peningkatan pemberdayaan industri didukung peran serta masyarakat. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah



koordinasi, sinkronisasi pemberdayaan industri dan peranserta masyarakat sebanyak 1 dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel  
Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peranserta masyarakat tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	620.000.000	580.842.057,
2	Keluaran	Jumlahkoordinasi,sinkronisasipelaksanaanpemberdayaanindustri dan peransertamasyarakat	1 kl	1 kl
3	Hasil	Keikutsertaanperansertamasyarakatdalam pemberdayaanindustri	100%	93,68

### 13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

#### 1. Penerbitan izinusaha industri (IUI), izin usaha perluasan industri (IUPI), Izin usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI), kewenangan kab/kota berbasis sitem informasi industri.

##### 1. Sub. kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS).

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,-terrealisasi sebesar Rp. 18.203.100,- atau 91,02% digunakan untuk koordinasi sinkronisasi penerbitan dan perluasan kawasan industri. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS) sebanyak 1dok selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel  
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS) tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	20.000.000	18.203.100.-
2	Keluaran	JumlahFasilitasipengumpulanpengolahan dan analisis data industri,datakawasan industry serta data lain lingkupkabupaten/kotamelaluisisteminformasiindustrinasional (SIINas)	1dok	1dok

3	Hasil	Tersedianyadokumen data analisis dan kawasan industry melaluisisteminpormasiindustrinasional (SIINas)	100%	91,02%
---	-------	---	------	--------

#### 14. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

##### 1. Kegiatan penyediaan informasi industri untu kinformasi industri untuk IUT, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota.

1. Sub. keg. fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui system informasi industri nasional (SIINas).

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 128.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 95.705.456,- atau 74,25% digunakan untuk peningkatan fasilitasi dan analisis data industri. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) sebanyak 1 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel  
Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) tahun 2023

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	128.900.000	95.705.456
2	Keluaran	Jumlah Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	1 dokl	1 dok
3	Hasil	Tersedianyadokumen data analisis dan kawasan industry melaluisisteminpormasiindustrinasional (SIINas)	100%	74,25

Program dan kegiatan  
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru  
Tahun Anggaran 2023 berikut table berikut ini:

No	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Presentasi		Ket
					K	Rp	
<b>I</b>	<b>Prog Perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan dukungan administrasi sekretariat yang sesuai SOP*)</b>	11.234.959.662	10.093.199.676	93,78	99,25	
<b>I</b>	<b>Keg. Perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan dukungan administrasi sekretariat yang sesuai SOP*)</b>	<b>429.800.822</b>	427.291.396	100	99,42	
1	Sub Keg. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	253.100.922	252.433.769	100	99,74	
2	Koordinasi dan penyusunan dok RKA SKPD	Jumlah dok perencanaan PD tersusun	8.000.000	7.27.600	100	90,85	
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan	Jumlah dok perubahan RKA SKPD	6.000.000	5.998.300	100	99,97	
4	Koordinasi dan penyusunan dok DPA SKPD	Jumlah dok DPA SKPD tersusun	6.000.000	5.998.385	100	99,97	
5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dok perubahan DPA - SKPD	5.000.000	4.546.400	100	90,93	
6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun	12.010.000	11.991.742	100	99,85	
7	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	139.689.900	139.055.200	100	99,55	
<b>II</b>	<b>Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*)</b>	<b>7.330.615.353</b>	6.295.191.055	92,88	85,88	
8	Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	6.697.351.557	5.693.825.930	100	85,02	
9	Sub Keg. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pengelolaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48.453.874	48.421.525	100	99,93	
10	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan skpd yang tersusun	580.310.000	548.450.000	100	94,51	
11	Sub Keg. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan tahunan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	3.499.948	3.495.300	100	99,87	
12	Sub Keg. Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	999.974	998.300	100	99,83	
<b>III</b>	<b>Keg. Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pertumbuhan SDM Perangkat Daerah*)</b>	<b>49.380.000</b>	48.229.090	100	97,67	
13	Sub Keg. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku	49.380.000	48.229.090	100	97,67	
<b>IV</b>	<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*)</b>	<b>993.768.347</b>	993.172.864	100	99,94	
14	Sub Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	29.941.160	29.941.093	100	100	
15	Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	24.940.869	24.923.230	100	99,97	
16	Sub Keg. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	478.776.818	478.393.477	100	99,92	
17	Sub Keg. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	35.001.500	34.850.300	100	99,57	
18	Sub Keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	425.108.000	425.063.758	100	99,99	
<b>V</b>	<b>Keg. Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*)</b>	107.154.120	94.275.000	100	87,98	
19	Sub Keg. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang tidak	107.154.120	94.275.000	100	87,98	

VI	<b>Keg. Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.926.200.000</b>	1.892.026.969	100	98,23	
20	Sub Keg. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat	6.000.000	5.000.000	100	88,33	
21	Sub Keg. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah langganan pembayaran jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	356.700.000	325.528.969	100	91,26	
22	Sub Keg. Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum Kantor	1.563.500.000	1.561.500.000	100	99,87	
VII	<b>Keg. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *)</b>	347.055.567	343.011.302	66,66	98,83	
23	Sub Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional	154.075.567	151.835.302	100	98,55	
24	Sub Keg. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	77.280.000	75.715.000	100	97,97	
25	Sub Keg. Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor lainnya	115.700.000	115.461.000	100	99,79	
	<b>Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah</b>						
	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT</b>	290.000.000	289.398.109	100	99,79	
Viii	<b>Keg. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / kota</b>	<b>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>	290.000.000	289.399.109	100	99,79	
26	Sub Keg. Pengawasan kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten / kota.	Jumlah pengawasan revitalisasi dan fasilitasi RAT	130.000.000	129.769.426	100	99,82	
27	Sub Keg. Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten / kota.	Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten / kota	160.000.000	159.028.083	100	99,77	
	<b>Program Pendidikan dan Latihan perkoperasian</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian</b>					
IX	<b>Keg. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya keanggotaannya dalam daerah kabupaten / Kota.</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian</b>	257.108.068	256.261.600	100	99,67	
28	Sub Keg. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi..	Jumlah bintek pengembangan <b>Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan</b> SDM koperasi dan jumlah pelaksanaan sosialisasi perkoperasian	257.108.068	256.261.600	100	99,67	
	<b>Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan</b>					
X	<b>Keg. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten / kota.</b>	<b>Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah</b>	90.000.000	89.984.700	100	99,98	
29	Sub Keg. Pemberdayaan peningkatan produktivitas, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten / kota	Jumlah fasilitasi kemitraan dan sarana usaha monitoring dan evaluasi koperasi, koperasi penerima dana bantuan RAP dan evaluasi NRB	90.000.000	89.984.700	100	99,98	

	<b>Program pemberdayaan usahamengengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b>					
<b>XI</b>	<b>Keg.pemberdayaanusahamikro yang dilakukanmelaiupendataan,kemitraan, kemudahanperizinan, penguatankelembagaan dan koordinasidengan para pemangku kepentingan</b>	<b>PersentasePemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukanmelaiupendataan, Kemitraan, KemudahanPerizinan, PenguatanKelembagaan dan Koordinasidengan Para PemangkuKepentingan</b>	4.206.261.513	1.692.341.466	53,29	40,23	
28	Sub Keg.pendataanpotensi dan pengembanganusahamikro.	Jumlahfasilitasisaranaproduksi UMK	3.833.999.858	1.346.273.877	48,75	35,11	
29	<b>Sub Keg.Pasilitasikemudahanperizinanusahamikro.</b>	Jumlahusahamikrokecil yangmemilikilegalitasusaha	159.999.723,	136.822.589	100	85,51	
30	Sub keg. Pemberdayaankelembagaanpotensi dan pengembanganusahamikro.	Jumlahusahamikrokecil yangmemilikilegalitasusaha	212.261.932	209.245.000	100	98,58	
	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan</b>	410.059.838	399.319.740	100	97,38	
<b>XII</b>	<b>Keg.Pengembanganusahamikro denganorientasipeningkatan skalausahamenjadiusahamikro</b>	<b>Persentaseusahamikro yang diberikandukunganasilitasitandarisasi dan sertifikasi produkusaha</b>	410.059.838	399.319.740	100	97,38	
31	Sub Keg. Fasilitasusahamikromenjadiusaha kecildalam pengembanganproduksi dan pengolahan, pemasaran SDM, sertadesain dan teknologi.	Jumlah UMK yang didukung pengetahuan teknologi dan jumlahpromosiproduk UMKM	410.059.838	399.319.740	100	97,38	
	<b>URUSAN PERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						
	<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>Persentaserekomendasiperizinan yang diterbitkan sesuaidenganketentuan yang berlaku</b>	200.000.000	121.071.830	85,00	60,54	
<b>XIII</b>	<i>Penerbitantanda daftar perusahaan</i>	Persentaserekomendasiperizinan yang diterbitkan sesuaidenganketentuan yang berlaku	100.000.000	80.541.130	100	89,54	
<b>32</b>	<b>Fasilitasipenerbitantanda daftar gudang</b>	<b>Jumlahrekomendasipenerbitantanda daftar gudang</b>	100.000.000	80.541.130	100	89,54	
XIV	<b>Keg.Penerbitan Surat KeteranganAsal(bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telahditetapkansebagaiinstansipenerbit Surat KeteranganAsal ( SKA)</b>	<b>PersentasePenerbitan Surat KeteranganAsal bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah DitetapkanSebagaiInstansiPenerbit Surat KeteranganAsal / SKA</b>	100.000.000	40.530.700	70,00	40,53	
32	Sub Keg. Koordinasi dan sinkronisasilayananpenerbitan SKA.	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	100.000.000	40.530.700	70,00	40,53	
	<b>Program Peningkatan Sarana distribusi perdagangan</b>	<b>Persentase pembangunan Sarana DistribusiPerdagangan</b>					
<b>XV</b>	<b>Keg. Pembangunan dan pengelolaan Sarana distribusi perdagangan</b>	<b>Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan</b>	3.313.779.929	2.954.251.881	100	89,15	
33	<b>Sub Keg.Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan.</b>	Jumlah pasar yang dibangun dan jlhpemeliharaan bangunan pasar	3.103.781.561	2.766.508.823	100	89,14	
34	Sub Keg. Fasilitasipengelolaan Sarana distribusi perdagangan.	Jumlahpemeliharaansaluranair, jumatbersih, taman, pengawasanketertamanan pasar dan timkebersihanadipura	209.998.368	187.653.058	100	89,36	
<b>18</b>	<b>Keg Pembinaan terhadap Pengelola saranaadistribusi perdagangan masyarakatdi wilayah kerjanya.</b>	<b>Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	122.998.958	114.898.958	100	93,41	
35	Sub Keg. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.	Jumlah penataan/penertibatan pusatahapedagang	122.998.958	114.898.958	100	93,41	
	<b>Program Stabilisasi Harga barangKebutuhan Pokok dan Barangpenting</b>	<b>Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok</b>					

XVI	<b>Keg. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota.</b>	<b>Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	237.380.967	163.096.967	100	93,41	
36	Sub Keg. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan.	Jumlah informasi dan data kebutuhan harga bahan pokok ke tingkat pasar rakyat	237.380.967	163.096.967	100	93,41	
	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar</b>					
XVII	<b>Keg. Pelaksanaan metrology legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	324.999.756	265.673.027	100	81,75	
37	Sub Keg. Pelaksanaan metrology legal, berupa tera, tera ulang.	Jumlah pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang	149.999.860	121.032.090	100	80,69	
38	Sub Keg. Pengawasan/penyuluhan metrology legal.	Jumlah pengawasan/penyuluhan metrologi legal	84.999.896	68.755.000	100	80,89	
39	Sub Keg. Penyidikan metrology legal.	Jumlah penyidikan metrology legal	90.000.000	75.885.337	100	84,32	
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>					
XVIII	Keg. Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	49.999.082	32.527.082	100	65,06	
40	Sub Keg. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Peningkatan sistem dan informasi jaringan perdagangan	49.999.082	32.527.082	100	65,06	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						
	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>Persentase Pertumbuhan IKM</b>	3.203.000.000	2.420.603.127	82,83	75,57	
XIX	<b>Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.</b>	<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>	3.203.000.000	2.420.603.127	82,83	75,57	
41	Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumbu berdaya industri.	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumbu berdaya industri	239.000.000	202.132.639	100	84,57	
42	Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri.	Jumlah Pengembangan inovasi produksi IKM/sarana dan prasarana industri	2.344.000.000	1.637.628.431	76,00	69,86	
43	Sub keg. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan partisipasi masyarakat	Jumlah Pembinaan keterampilan pengrajin promosi dan raker	620.000.000	580.842.057	100	93,68	
	<b>Program pengendalian izin usaha industri</b>	<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI)</b>					
XX	<b>Keg. Penerbitan izin usaha industri (IUI) izin perluasan usaha industri (IPUI) izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kab/kota berbasis sistem informasi industri</b>	<b>Jumlah penerbitan izin usaha industri (IUI) izin perluasan usaha industri (IPUI) izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)</b>	20.000.000	18.203.100	100	91,02	

44	Sub Keg. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang industri dalam lingkup IUI, IUPi, IUKI, IPK kewenangan kab/Kota berbasis system informasi industri nasional (SIINAS)	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IUPi, IUKI, IPK kewenangan kab/Kota berbasis system informasi industri nasional	20.000.000	18.203.100	100	91,02	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase penyediaan system informasi data industri secara lengkap dan terkini					
<b>XXI</b>	<b>Keg. Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IUPi, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota.</b>	<b>Persentase perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kab/Kota yang masuk dalam SIINAS</b>	128.900.000	95.705.456	90	74,25	
45	Sub Keg. Fasilitas pengumpulan pengolahan dan analisis data industri data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS).	Jumlah data koordinasi dan sinkronisasi	128.900.000	95.705.456	90	74,25	
<b>Jumlah</b>			<b>24.038.462.320</b>	<b>19.006.536,725</b>	<b>89,06</b>	<b>79,07</b>	

## 2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DILAKSANAKAN

Kebijakan Strategi disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang selaras dengan rencana program dan kegiatan prioritas. Dalam rancangan awal Strategi yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi Dinas Koperasi Kabupaten Kotabaru dalam rangka mencapai visi, misi pemerintah daerah, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

Strategis	Arah kebijakan
Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Peningkatan akses teknologi, kualitas produk, modalan dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
Mengembangkan industri dan perdagangan	Peningkatan volume dan nilai industri dan perdagangan
Meningkatkan kualitas SDM bagi para pelaku IKM, koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan bimbingan teknis / pelatihan bagi para Pembina, pelaku IKM, koperasi dan UMKM</li> <li>2. Menumbuhkembangkan wirausaha baru sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah</li> </ol>
Meningkatkan peran koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk-produk UMKM dan Koperasi</li> <li>2. Meningkatkan akses modalan dan pemasaran produk-produk UMKM dan Koperasi</li> </ol>
Mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan menjadikan industri rakyat sebagai motor penggerak dan industri perdagangan dan jasa sebagai pendukung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan industri berbasis sumberdaya terutama pertanian, perikanan dan kehutanan</li> <li>2. Membangun klaster industri sesuai dengan potensi unggulan daerah masing-masing</li> <li>3. Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat</li> <li>4. Melakukan menata / pengawasan perdagangan</li> </ol>



### 2.2.1.Indikatorkinerjakuncikeluaran (Output)

#### Dinas Koperasi Perindustrian dan PerdaganganKabupatenKotabaru

No	UrusanPemerintahan	Indikatorkinerjakuncikeluaran		Capaiankinerja	Sumber data	ket
1	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.1	Persentasefasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaandalamdaerahkabupaten/kota	$12 / 18 \times 100 \% = 66,66 \%$	Dinas Koperasiperindustrian dan perdaganganKotabaru	
		1.2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$7 / 11 \times 100 \% = 63,63 \%$		
		1.3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$74 / 115 \times 100 \% = 64,34 \%$		
		1.4	Persentase usaha simpanpinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$14 / 18 \times 100 \% = 77,77 \%$		
		1.5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$63 / 115 \times 100 \% = 54,78 \%$		
		1.6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$170 / 115 \times 100 = 147,826 \%$		
		1.7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$2 / 115 \times 100 \% = 1,73 \%$		
		1.8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	$35 / 115 \times 100 \% = 30,43 \%$		
		1.9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$36 / 115 \times 100 \% = 31,30 \%$		
		1.10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$35 / 115 \times 100 \% = 30,43 \%$		
		1.11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		Tidak ada data
		1.12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$56 / 113 \times 100 \% = 48,69 \%$		
		1.13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$32 / 115 \times 100 = 27,82 \%$		
	UMKM	2.1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$126 / 8863 \times 100 \% = 1,421 \%$		
		2.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem online data system (ODS)	0		Tidak ada data

		2.3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0		Tidak ada data
		2.4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$6 / 126 \times 100 = 4,76 \%$		
		2.5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	$25 / 126 \times 100 \% = 19,84 \%$		
		2.6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$25 / 126 \times 100 \% = 19,84 \%$		
		2.7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$126 / 8863 \times 100 \% = 1,421\%$		
<b>2</b>	<b>Perdagangan</b>	1.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :			
			a. Pusat perbelanjaan	0		Tidak ada data
			b. Toko swalayan	0		Tidak ada data
		1.2	Persentase penerbitan TDG	0		Tidak ada data
		1.3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0		Tidak ada data
		1.4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0		Tidak ada data
		1.5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0		Tidak ada data
		1.6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$58 / 1080 \times 100 \% = 5,37 \%$		
		1.7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$3 / 65 \times 100 = 4,61 \%$		
		1.8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	$96 / 96 \times 100 \% = 100 \%$		
		2.1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$7228 / 5316 \times 100 \% = 135,966 \%$		
		3.1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$665 / 48847 \times 100 \% = 13,60 \%$		
		3.2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0		Tidak ada data
<b>3</b>	<b>Perindustrian</b>	1.1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0		Tidak ada data
		2.1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	$15 / 15 \times 100 \% = 100$		
		3.1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0		Wewenang Provinsi
		4.1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	$15 / 135 \times 100 \% = 11,11$		
		5.1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$48 / 2284 \times 100 \% = 2,10$		

## 2.2. Indikator kinerja kunci hasil (OUTCOME)

No	Urutan Pemerintahan	indicator kinerja kunci hasil	capaian kinerja	sumber data	ket
1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	1 Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	$17 / 115 \times 100 \% = 14,78\%$	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru	Bidang Koperasi
		2 Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$126 / 8863 \times 100 \% = 1,421\%$		Bidang UKM
2	Perdagangan	1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$1780 / 1786 \times 100 \% = 99,66 \%$	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru	Bidang Perdagangan
		2 Persentase kinerja realisasi pupuk	$7228 / 5316 \times 100 \% = 135,966 \%$		Bidang Kemetrologian
		3 Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$665 / 48847 \times 100 \% = 13,60 \%$		Bidang Kemetrologian
3	Perindustrian	1 Pertambahan jumlah industry kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$(135 - 57) / 57 \times 100 \% = 136,84 \%$	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru	Bidang Perindustrian
		2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	$15 / 15 \times 100 \% = 100$		Tahap sudah di No 15 dari 15 Tahapan, sehingga $15 / 15 \times 100 = 100\%$
		3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$33 / 135 \times 100 \% = 30,693$		
		4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		Tidak ada data
		5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$1/1 \times 100\% = 100\%$		Tidak ada data
		6 Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	115		Hasilnya adalah 115 % terdiri dari : 1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) – Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (0%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)

## 2.5. Capaian Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

## 2.6. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

### 2.6.1 Target kinerja dan perjanjian Kinerja

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022. Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel**  
**Target Kinerja dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2023**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target thn 2022		Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Meningkatnya tata kelola koperasi	-persentas koperasi aktif	46,67%	1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	11.183.974.209
		-Presentasi koperasi berkualitas	0.0%					
	Meningkatnya usaha mikro	-Persentasi usaha mikro menjadi usaha kecil	60 %	2	Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	<b>Persentasi Koperasi yang melaksanakan RAT</b>	39,13%	160.000.000
	Meningkatnya pembinaan industri pengolahan berbasis produk lokal	-Persentasi industri kecil dengan produk yang memenuhi standard mutu	60 %	3	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian</b>	47,62%	257.108.068
	Meningkatnya pelayanan metrologi dan tera	Cakupan alat ukur timbangan dan perlengkapannya yang dilakukan tera/tera ulang	60%	4	Perberdayaan dan Perlindungan koperasi	<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan</b>	57,14 %	190.000.000
	Meningkatnya jumlah prasarana perdagangan dan ketersediaan barang pokok dan penting	-Persentasi sarana dan prasarana pasar yang dikelola dengan baik	27,69%	5	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b>	60 %	2.898.999.620
		-persentasi sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	0 %	6	Pengembangan UMKM	<b>Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan</b>	60 %	410.059.938.
		- Cakupan ketersediaan informasi harga pokok dan penting	100%	7	Perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase penerbitan ijin perusahaan	88,89 %	200.000.000
				8	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	<b>Persentase pembanguan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	53,85 %	2.509.097.062.

		9	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<b>Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok</b>	100 %	119.999.567
		10	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100%	49.999.082.
		11	Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	60%	324,999,847
			Perencanaan dan Pembangunan industri	<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>	60 %	2.103.000.000
		12	Pengendalian jinis usaha industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) yang dikeluarkan instansi terkait	4,39%	20.000.000.
		13	Pengelolaan sistem informasi industri nasional	<b>Persentase Penyediaan Sistem Informasi Data Industri secara lengkap dan terkini</b>	84 %	100.000.000

## 2.6.2. Pengukuran capaian kinerja di banding dengan target perjanjian kinerja.

No	Sasaran strategis	Indicator kinerja	Target	Realisasi thn 2023	Ket
	Meningkatnya tata kelola operasi	persentase koperasi aktif	46,67 %	53,49 %	
		Persentase koperasi berkualitas	0.0%	0 %	
	Meningkatnya usaha mikro	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	60 %	1,42 %	
	Meningkatnya pembinaan industri pengolahan berbasis produk lokal	Persentase industri kecil dengan produk yang memenuhi standar mutu	60 %	0,25 %	
	Meningkatnya pelayanan kemetrologian dan tera	Cakupan alat ukur timbangan dan perlengkapannya yang dilakukan tera/tera ulang	60%	1,36 %	
	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perdagangan dan ketersediaan barang pokok dan penting	Persentase sarana dan prasarana pasar yang dikelola dengan baik	27,69%	46,15 %	
		persentase sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	0%	4,61 %	
		Cakupan ketersediaan informasi harga barang pokok dan penting	100%	100 %	

### 2.6.3. Pengukuran capaian kinerja dibanding dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran strategis	Indicator kinerja	Target	Realisasi tahun 2023	Perbandingan tahun 2022 realisasi
1	Meningkatnya tata kelola koperasi	persentase koperasi aktif	66,67 %	53,49 %	52,88 %
		Persentase koperasi berkualitas	0.0%	0 %	0 %
	Meningkatnya usaha mikro	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	24,44 %	1,42 %	5,66 %
	Meningkatnya pembinaan industri pengolahan berbasis produk lokal	Persentase industri kecil dengan produk yang memenuhi standar mutu	55 %	0,25 %	49,50 %
	Meningkatnya pelayanan metrologi dan tera	Cakupan alat ukur timbangan dan perlengkapannya yang dilakukan tera/tera ulang	40%	1,36 %	1,97 %
	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perdagangan dan ketersediaan barang pokok dan penting	Persentase sarana dan prasarana pasar yang dikelola dengan baik	40%	46,15 %	38,46 %
		persentase sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	23,08%	4,61 %	46,15 %
		Cakupan ketersediaan informasi harga pokok dan penting	100%	100 %	100 %

### 2.6.4 Pengukuran Capaian kinerja dibanding dengan target dalam pembangunan jangka menengah.

No.	Indikator Kinerja Utama/Sasaran	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi s/d 2021 terhadap RPJMD Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase Koperasi Aktif	46,69 %	53,49 %	1,45 %	66,39%	45,79 %
2.	Persentase Koperasi Berkualitas	0.0%	0 %	0 %	5,00%	0 %
3.	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	60 %	1,42 %	0,23 %	22,22%	96,60 %
4.	Persentase industri kecil dengan produk yang memenuhi standar mutu	60 %	0,25 %	0,37 %	100%	27,02 %
5	Cakupan alat ukur timbangan dan perlengkapannya yang dilakukan tera/tera ulang	60%	1,36 %	0,23 %	5,11%	22,22 %
6	Persentase sarana dan prasarana pasar yang dikelola dengan baik	27,69%	46,15 %	1,67 %	5,79%	3,47 %
7	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	32,31 %	4,61 %	1,43 %	4,34%	3,03 %
8	Cakupan ketersediaan informasi harga pokok dan penting	100%	100 %	1.0 %	80%	80 %

### **2.6.5 Analisis efesiensi pengguna sumber daya dikaitkan dengan hasil yang telah di capai**

Sumber daya dalam suatu kegiatan akan berpengaruh terhadap penggunaan anggaran. Semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia pada lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan regenerasi SDM pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kotabaru, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksi.
2. Tingkat pendidikan dasar yang paling utama dalam menyusun dan penugasan aparatur dalam mengemban jabatan yang diberikan sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Hal ini terlihat bahwa tingkat pencapaian kinerja dan anggaran walaupun adanya pandemi COVID-19. Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sasaran strategis dapat tercapai dengan baik walaupun hingga saat ini pandemi masih berlangsung. Ada beberapa sasaran strategis yang targetnya sangat kurang, yaitu;

1. Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil sebagai upaya pemulihan ekonomi, kegiatan usaha kecil dapat tumbuh dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatnya pembinaan industri pengolahan berbasis produk lokal ditarget pada tahun 2023 sebagai 60% dan dapat dilaksanakan dari pencapaian target walaupun terbatasnya pengembangan pengolahan produk lokal
3. Meningkatnya pelayanan kemetriologian dan tera ulang pada tahun 2023 sebesar 60% dan dari jumlah seluruh UTTP karena terbatasnya data penggunaan peralatan alat ukur takar dan timbang dan perlengkapannya sehingga target tidak tercapai untuk melakukan tera/tera ulang.

4. Meningkatnya sarana dan prasarana pasar ditahun 2023 ditargetkan sebesar 27,69 % sebagai upaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan anggaran dari APBD untuk revitalisasi sangat kurang sedangkan untuk informasi harga bahan pokok dan penting ditargetkan sebesar 100% dalam pendataan harga kebutuhan barang pokok penting.

#### 2.6.6. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

No	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Presentasi		Ket
					K	Rp	
1	<b>Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT</b>	<b>290.000.000</b>	<b>289.398.109</b>	<b>100</b>	<b>99,79</b>	
	<b>Keg.</b> Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten /Kota	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten /Kota	<b>290.000.000</b>	<b>289.398.109</b>	<b>100</b>	<b>99,79</b>	
	<b>Sub Keg.</b> Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi ke wewenang kabupaten /kota.	Jumlah Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi ke wewenang kabupaten /kota.	130.000.000	129.769.426	100	99,82	
	<b>Sub Keg.</b> Pemeriksaan kepatuhan kooperasi terhadap peraturan perundang-undangan ke wewenang kabupaten /Kota	Jumlah rakor, rakor nasional, koordinasi dan konsultasi program, koperasi prestasi dan penyuluhan per koperasi	160.000.000	159.628.683	100	99,77	
2	<b>Program Pendidikan dan pelatihan per koperasi.</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan per koperasi</b>	<b>257.108.068</b>	<b>256.261.600</b>	<b>100</b>	<b>99,67</b>	
	<b>Keg.</b> Pendidikan dan latihan per koperasi bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten /kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan per koperasi	<b>257.108.068</b>	<b>256.261.600</b>	<b>100</b>	<b>99,67</b>	
	<b>Sub Keg.</b> Peningkatan pemahaman dan pengetahuan per koperasi serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.	Jumlah Peningkatan pemahaman dan pengetahuan per koperasi serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	257.108.068	256.261.600	100	99,67	
	<b>Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi.</b>	<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan</b>	<b>90.000.000</b>	<b>89.984.700</b>	<b>100</b>	<b>99,98</b>	
	<b>Keg.</b> Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten /kota	Persentase koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah	<b>90.000.000</b>	<b>89.984.700</b>	<b>100</b>	<b>99,98</b>	
25	<b>Sub Keg.</b> Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi ke wewenang kabupaten /kota	Jumlah Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi ke wewenang kabupaten /kota	90.000.000	89.984.700	100	99,98	
	<b>Program pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)</b>	<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b>	<b>4.209,261513</b>	<b>1.692.341.466</b>	<b>53,29</b>	<b>40,23</b>	
	<b>Keg.</b> Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, mitraan, kemudahan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, mitraan, kemudahan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	<b>4.209,261513</b>	<b>1.692.341.466</b>	<b>53,29</b>	<b>40,23</b>	



	pemangkunkepentingan						
	<b>Sub Kegiatan</b> pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro.	Jumlah pendataan potensi pengembangan usaha mikro	3.833.999.858	1.346.273.877	48,75	35,11	
	<b>Sub Kegiatan</b> Pasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro.	Jumlah fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro	159.999.723	136.822.589	100	85,51	
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemberdayaan kelemagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.	Jumlah Pemberdayaan kelemagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.	212.261.932	209.245.000	100	98,58	
29	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan</b>	410.059.838	<b>399.319.740</b>	<b>100</b>	<b>97,38</b>	
	<b>Keg.</b> Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas dan sertifikasi produk usaha	410.059.838	<b>399.319.740</b>	<b>100</b>	<b>97,38</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, sertifikasi desain dan teknologi.	Jumlah fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, sertifikasi desain dan teknologi	410.059.838	399.319.740	100	97,38	
30	<b>Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan</b>	<b>Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>	<b>200.000.000</b>	<b>121.071.830</b>	<b>85.00</b>	<b>60,54</b>	
	<b>Keg.</b> Penerbitan tanda daftar gudang	Persentase rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang	<b>100.000.000</b>	<b>80.541.130</b>	<b>100</b>	<b>89,54</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitas penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang	100.000.000	80.541.130	100	89,54	
31	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten / Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat keterangan asal)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten / Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal)	<b>100.000.000</b>	<b>40.530.700</b>	<b>70.00</b>	<b>40,53</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA.	Jumlah Koordinasi pengelolaan bisnis perdagangan internasional	100.000.000	40.530.700	70.00	40,53	
	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan</b>	<b>Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>3.436.778.887</b>	<b>3.069.150.839</b>	<b>100</b>	<b>89,30</b>	
32	<b>Kegiatan</b> Pembangunan dan pengelolaan Sarana distribusi perdagangan	Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	<b>3.313.779.929</b>	<b>2.954.251.881</b>	<b>100</b>	<b>89,15</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.	Jumlah pasar yang dibangun dan jumlah pemeliharaan bangunan pasar	3.103.781.561	2.766.508.823	100	89,14	
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitas pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	209.998.368	187.653.058	100	89,36	
33	<b>Kegiatan</b> Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	<b>122.998.958</b>	<b>114.898.958</b>	<b>100</b>	<b>93,41</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.	Jumlah penataan/penerbitan empat usaha pedagang	122.998.958	114.898.958	100	93,41	
35	<b>Program Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting .</b>	<b>Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok</b>	<b>237.380.967</b>	<b>163.096.967</b>	<b>100</b>	<b>93,41</b>	
	<b>Kegiatan</b> Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota	<b>237.380.967</b>	<b>163.096.967</b>	<b>100</b>	<b>93,41</b>	

	<b>Sub Kegiatan</b> Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan.	Jumlah informasi dan data kebutuhan harga bahan pokok penting pasar rakyat	237.380.967	163.096.967	100	93,41	
	<b>Program Standarisasi dan perlindungan konsumen</b>	<b>Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen dan barang/jasa yang beredar</b>	<b>324.999.756</b>	<b>265.673.027</b>	<b>100</b>	<b>81,75</b>	
36	<b>Kegiatan Pelaksanaan metrology legal, berupatara, terulang dan pengawasan</b>	Persentase Pelaksanaan Metrology Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<b>324.999.756</b>	<b>265.673.027</b>	<b>100</b>	<b>81,75</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang.	Jumlah pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang	149.999.860	121.032.090	100	80,69	
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengawasan/penyuluhan metrology legal	Jumlah pengawasan/penyuluhan metrology legal	84.999.896	68.755.000	100	80,89	
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyidikan metrology legal	Jumlah penyidikan/penyuluhan metrology legal	90.000.000	75.885.337	100	84,32	
37	<b>Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>	<b>Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>	<b>49.999.082</b>	<b>32.527.082</b>	<b>100</b>	<b>65,06</b>	
	<b>Kegiatan</b> pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan perdagangan	Kegiatan pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan perdagangan	<b>49.999.082</b>	<b>32.527.082</b>	<b>100</b>	<b>65,06</b>	
	<b>Sub kegiatan</b> Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	49.999.082	32.527.082	100	65,06	
39	<b>Program Perencanaan dan pembangunan industri.</b>	<b>Persentase Pertumbuhan IKM</b>	<b>3.203.000.000</b>	<b>2.420.603.127</b>	<b>100</b>	<b>75,57</b>	
	<b>Kegiatan</b> Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.	Jumlah hasil penerapan RPIK yang ditetapkan jadi perda	<b>3.203.000.000</b>	<b>2.420.603.127</b>	<b>100</b>	<b>75,57</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumbu berdaya industri..	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumbu berdaya industri	239.000.000	202.132.639	100	84,57	
40	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri..	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	2.344.000.000	1.637.628.431	76,00	69,86	
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran sertamasyarakat	Jumlah Pembinaan keterampilan pengrajin promosi dan raker	620.000.000	580.842.057	100	93,68	
41	<b>Program pengendalian izin usaha industri</b>	<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>	<b>20.000.000</b>	<b>18.203.100</b>	<b>100</b>	<b>91,02</b>	
	<b>Kegiatan</b> Penerbitan ijin usaha industri (IUI) Ijin perluasan usaha industri (IPUI) ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)	Jumlah penerbitan ijin usaha industri (IUI) ijin perluasan usaha industri (IPUI) ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang berbasis sistem informasi industri	<b>20.000.000</b>	<b>18.203.100</b>	<b>100</b>	<b>91,02</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan di bidang industri dalam lingkup IUI<IPUI<IUKI<IPKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota	<b>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan di bidang industri dalam lingkup IUI IPUI IUKI IPKI</b> kewenangan kabupaten/kota berbasis sistem	20.000.000	<b>18.203.100</b>	<b>100</b>	<b>91,02</b>	

	rbaisi system informasiindutrinasional(SIINA S)	informasiindutrinasional (SIINAS)					
42	<b>Program pengelolaan system informasi industri nasional</b>	<b>PersentasePenyediaanSiste minformasi Data IndustriSecaralengkap dan terkini</b>	128.900.000	<b>95.705.456</b>	<b>90.00</b>	<b>74,25</b>	
43	<b>KegiatanPenyediaaninformas iindustriuntukinformasiindu striuntuk IUT, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangankabupaten/kota.</b>	PersentaseSisteminformasi Data IndustriTaskab/kota yang maukdalamsiNassecaralengk ap	128.900.000	<b>95.705.456</b>	<b>90.00</b>	<b>74,25</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasipengumpul anpengolahan dan analisis data industri, data kawasanindustrierta data lain lingkupkabupaten/kotamelalui siteminformasiindustrinasional (SIINas).	Jumlahdokumenfasilitasipeng umpulanpengolahan data dan analisi data industri data kawasan industri serta data lain lingkupkab/kota system informasi industri nasional SIINAS	128.900.000	<b>95.705.456</b>	<b>90.00</b>	<b>74,25</b>	

## 2.7. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2022

No	Rekomendasi	SKPD Penanggungjawab	Topik Permasalahan	Tindaklanjuti
10	Dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan dan infrastruktur untuk menunjang pemulihan ekonomi kabupaten kotabaru,ada beberapa strategi sebagai berikut : 1.Mendorong pemulihan perekonomian rakyat dan kesempatan kerja. 2. Meningkatkan kopetensi dan produktifitas tenaga kerja 3.Meningkatkan usaha pertanian,perdagangan,industry pariwisata dan UMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal	Dinas Koperindag	Langkah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi pada : 3.Kegiatan usaha sector perdagangan,industry dan UMKM	-.Memfasilitasi akses permodalan/pembiayaan terhadap pengembangan usaha mikro -.Memfasilitasi sertifikat halal bagi usacha kecil dan menengah
27	Pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan kesehatan,pendidikanbagi masyarakat Kabupaten Kotabaru dan meningkatkan UMKM bagi Masyarakat dan pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan kegiatan usha masyarakat	Dinas Koperindag	Langkah Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan : 3.UMKM	-.Melaksanakan pendampingan serta peningkatan pelatihan bagi pelaku usaha mikro -.memperluas pangsa pasar.

## **BAB III**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Tugas Desentralisasi dan Pembantuan yang merupakan sistem dan cerminan prosuder penugasan Pemerintah Kepada Daerah dan Desa serta penugasan dari daerah (provinsi atau Kabupaten Kota) kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia serta melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada pemberi tugas. Pemberian tugas dana alokasi khusus dimaksud untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

Dana alokasi khusus/DAK yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota biasanya bersumber dana dari APBN Kementerian. Pada tahun 2023 di Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kotabaru menerima anggaran pembiayaan Non Fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

#### **3.1 Tugas Pembantuan Pusat/Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota**

##### **3.1.1 Target Kinerja**

Kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus/DAK diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotabaru Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
Program dan kegiatan yang diterima oleh  
Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Instansi Pemberi Tugas	Jumlah Anggaran (Rp)
1	<b>Program</b> <b>Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)</b>  <b>Kegiatan</b> Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan  <b>Sub Kegiatan</b> Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia	212.261.932,-

### 3.1.2 Realisasi

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2023 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus / DAK yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 212.261.932,- dengan realisasi Rp. 209.245.000,- atau 98,58%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1.2**  
Realisasi Program dan Kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik Tahun 2023

No	Idang Urusan	Peraturan pelaksanaan	Program kegiatan output rincian kegiatan	Kab/Kota	SKPD pelaksana	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	%	Realisasi capaian kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bidang Usaha mikro	Kementerian Koperasi dan UKM	<b>Program</b> Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)  <b>Kegiatan</b> Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan  <b>Sub Kegiatan</b> Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kotabaru	Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan	212.261.932	209.245.000	98,58	-Wira usaha baru -peningkatan pelatihan usaha branding dan digital marketing Sebagai upaya untuk mendukung dan menciptakan lapangan usaha baru	100	
						212.261.932	209.245.000	98,58		100	

### **3.2. Tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota**

#### **3.2.1. Target Kinerja**

- Tidakada

#### **3.2.2. Realisasi**

- Tidakada

### **3.3 Permasalahan dan Kendala**

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan melalui dana alokasi khusus/DAK non fisik tidak ada permasalahan yang berarti.

Kendala :

- a. SDM yang belum meratanya dalam pengelolaan manajemen administrasi keuangan secara online.
- b. Belum terampilnya dalam penggunaan media sosial sebagai media pemasaran produk olahan secara online.

### **3.4 Saran dan Tidak Lanjut**

#### **➤ Saran**

Perlu peningkatan pelatihan bagi wira usaha baru secara berkelanjutan agar dalam pengelolaan keuangan maupun administrasi lainnya dapat terukur dan tepat sasaran.

#### **➤ Tindak lanjut**

Untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan bagi wira usaha baru serta dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkenaan dengan manajemen administrasi dan keuangan serta pemasaran produk olahan baik secara manual maupun online.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **4.1. Urusan Yang dilaksanakan**

##### **4.1.1. Jenis pelayanan Dasar**

- Tidak ada

##### **4.1.2. Target pencapaian SPM**

- Tidak ada

##### **4.1.3. Realisasi**

- Tidak ada

##### **4.1.4. Alokasi Anggaran**

- Tidak ada

##### **4.1.5. Dokumen Personil**

- Tidak ada

##### **4.1.6. Permasalahan dan Solusi**

- Tidak ada

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan tersusunnya Laporan ini diharapkan akan mendapat masukan yang berguna bagi perbaikan Kinerja dan Perkembangan dimasa – masa yang akan datang kearah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa member bimbingan dan petunjuk serta kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pembangunan.

Kotabaru, Januari 2024

Kepala Dinas,

**Ir. H. Hardhani, M.Si**

Nip. 19650401 199308 1001

Pembina Utama Muda IV/c